

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh

ASRIANTI

10700113093

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asrianti
NIM : 10700113093
Tempat/Tgl.Lahir : Japing, 17 Oktober 1994
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Pattalassang
Judul :Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja
Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa,
Penyusun,

2017

Asrianti
NIM: 10700113093

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia ”**, yang disusun oleh **Asrianti**, NIM: **10700113093**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2017, bertepatan dengan 04 Rabi’ul-Awwal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi.


Gowa, 23 November 2017
04 Rabi’ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Syaharuddin, M. Si.	(.....)
Munaqasyah I	: Dr. H. Abd Wahab, SE., M. Si	(.....)
Munaqasyah II	: Saiful, SE., M. SA., Akt	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Aulia Rahman, SE., M. Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, sehigga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan taslim tidak lupa penyusun curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang aman dan sejahtera. Atas izin dan kehendak Allah SWT skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini berjudul “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia” telah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Anwar dan Ibunda Hamnun yang telah mendidiku, menyekolahkanku serta tiada henti dalam

memberikan cinta, kasih sayang dan doa, serta keluarga yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materil maupun moril dan doa yang senantiasa menyertai penyusun sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Siradjuddin, SE, M.Si dan Hasbiullah, SE., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan dan bimbingannya selama ini.
5. Bapak Prof Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag selaku pembimbing I dan Aulia Rahman. B, SE., M.Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Untuk penguji komprehensif Dr Siradjuddin.,M.Si, Dr. H Abdul Wahab, SE.,M.Si dan Mustafa Umar, S.Ag.,M.Ag yang telah mengajarkan kepada penulis bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja.
7. Seluruh tenaga pengajar dan pendidik khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penyusun

selama proses perkuliahan dan dengan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penyusun.

8. Kakak saya Ansyar, adek saya Anisadan semua keluarga saya yang tidak bosan memberi dukungan, semangat serta doa.
9. Untuk Sahabat terbaik saya andini, uci, uni sri,rina. Terima kasih untuk semangat kalian yang tidak pernah putus.
10. Terima kasih teman-teman seangkatan Ilmu Ekonomi 2013, angkatan kita yang tersolid dan terhebat semoga semuanya tidak terlupakan dan menjadi kenangan yang indah untuk dikenang nanti.
11. Untuk teman seperjuangan Andini,Anwar, Anca, Adi, Awal, Azis, Dewi, Anto, Sinta, Sri, Ayu, Elha, Ana, uchi. yang setia menunggu di depan jurusan dan merasakan susahnya perjuangan untuk meraih gelar SE.
12. Seluruh teman-teman KKN Reguler Angkatan 54 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jennepono posko 7. teman-teman posko Wika,Uni, Witri, Haidir, Haerul, Reski, Fia, Bahar, Samsul. Dua bulan merupakan waktu yang sangat berharga bagi hidup saya, bahagia telah mengenal kalian teman-teman yang luar biasa dan tak akan pernah terlupakan.
13. Terima kasih buat sang motivator terhebatku dibelakang layar, yang selalu punya seribu kata-kata jitu untuk membuat saya tetap semangat melewati

krikil-krikil tajam bangku perkuliahan, nasehat-nasehat yang sangat berharga terima kasih, *so much more than just thanks*

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penyusun tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pembaca. Amin.

Gowa,

2017

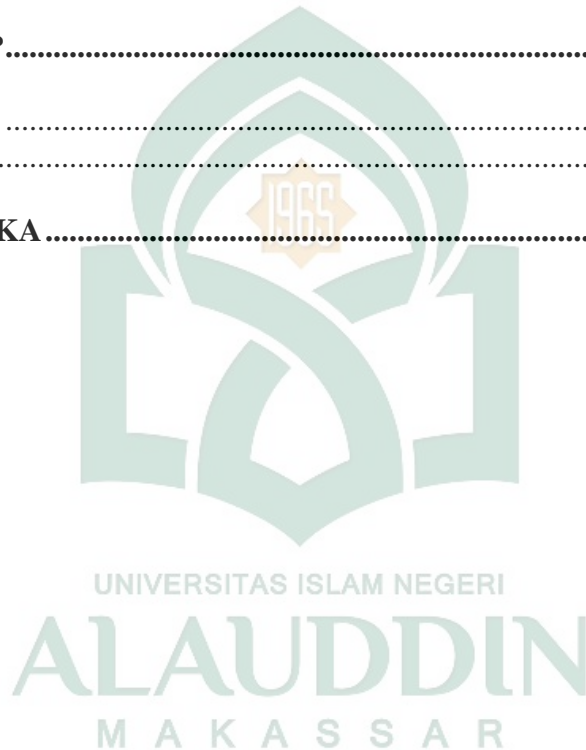
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Teori Kemiskinan.....	11
B. Perspektif Islam Tentang Kemiskinan	24
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi	27
D. Teori Pengangguran	29
E. Teori Belanja Pemerintah	32
F. Hubungan Variabel	37
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan..	37
2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan	39
3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan..	42
G. Penelitian Terdahulu	43
H. Kerangka Fikir	44
I. Hipotesis.....	45
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	46

B. Jenis dan Sumber Data.....	46
C. Metode Pengumpulan Data.....	46
D. Metode Analisis Data.....	47
E. Defenisi Oprasional.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Objek Penimitian.....	53
B. Deskripsi Perkembangan Variabel.....	55
C. Hasil Pengolahan Data.....	59
D. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.1 Jumlah Kemiskinan Indonesia	2
1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	5
1.3 Tingkat Pengangguran Indonesia	6
1.4 Jumlah Belanja Pemerintah Indonesia	8
4.1 Jumlah Kemiskinan Indonesia	55
4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	56
4.3 Tingkat Pengangguran Indonesia	57
4.4 Jumlah Belanja Pemerintah Indonesia	58
4.5 Uji Multikolienaritas	61
4.6 Hasil uji Autokorelasi	63
4.7 Hasil Uji Regresi	65
4.8 Koefisien Determinasi	66
4.9 Hasil Uji Simultan	67
4.10 Hasil Uji Parsial	68

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	44
4.1 Grafik Histogram	60
4.2 Uji Normal P-Plot	60
4.3 Uji Heterokedastisitas.....	64



ABSTRAK

Nama : Asrianti
Nim : 10700113093
Judul Skripsi : **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2007-2016**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah di Indonesia. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif pada rentang waktu antara tahun 2007-2016. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Sumber data berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Pusat Statistik dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent dengan bantuan SPSS 20.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tapi variabel belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.133 variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tapi variabel belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di. Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari hasil regresi di atas nilai R^2 sebesar 0.981, ini berarti variasi variabel independent menjelaskan variasi dependent di Indonesia sebesar 98,1% dan sisanya variasi variabel lain dijelaskan di luar model sebesar 19%.

Kata kunci: **Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, belanja Pemerintah dan Kemiskinan Indonesia**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah penting bagi semua yang ada di dunia, khususnya di Indonesia yang masih merupakan negara sedang berkembang (NSB). Sejak negara ini merdeka kemiskinan menjadi masalah yang serius di Indonesia. Masalah kemiskinan yang begitu kompleks berkaitan dengan aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi dan aspek yang lainnya. Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara harus diperhatikan sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup di suatu wilayah tertentu (Siregar, 2008: 25)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari badan pusat statistik, indonesia memiliki grafik kemiskinan dari periode 2007 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1 jumlah kemiskinan Indonesia tahun 2007-2016

No	Tahun	Jumlah jiwa (juta)	Kemiskinan (%)
1	2007	37,170.000	16,58
2	2008	34,960.000	15,42
3	2009	32,530.000	14,15
4	2010	31,020.000	13,30
5	2011	29,890.000	12,50
6	2012	28,590.000	12,00
7	2013	28,550.000	11,40
8	2014	27,730.000	11,20
9	2015	28,590.000	11,22
10	2016	28.010.000	10,86

Sumber : Badan Pusat Statistik indonesia, Tahun 2017

Dari tabel di atas mengindikasikan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan penurunan jika merujuk pada jumlah kemiskinan yang dihitung dari jumlah jiwa dan persen pada tahun 2007-2016 meskipun tidak secara signifikan.

Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa sebuah keberhasilan. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk di kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan (Kuncoro, 2006: 18).

QS. Ar-Rum, 30:38 :

فَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya :

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Departemen Agama RI, QS. Ar-rum, 30:38)

QS. Al-Maun, 107:1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahannya :

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) itulah orang yang menghardik anak yatim, (2) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, (3). (Departemen Agama RI, QS. Al-Maun, 107:1-3)

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dalam konteks kepemimpinan islam dikatakan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, oleh karena itu masyarakat yang miskin memiliki hak-hak pada pemimpinnya yakni mendapatkan perlindungan secara hukum dan kehidupan yang layak termasuk terbebas dari lubang kemiskinan. Upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, telah banyak dilakukan baik berupa melalui program pemberdayaan masyarakat maupun bantuan lainnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (istitusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau memungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyusaian-penyusaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2011).

Masing-masing ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu. Yaitu, 1) kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari pada yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan penyediaan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu Negara yang bersangkutan, 2) perkembangan teknologi merupakan dasar prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara

berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang diperlukan, tetap tidak cukup itu saja disamping kemajuan teknologi masih diperlukan faktor-faktor lain, 3) guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkadang didalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkain kelembagaan, sikap, dan ideologi. Menurut data yang penulis dapatkan pertumbuhan ekonomi indonesia periode 2007 sampai 2016 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007-2016

No	Tahun	Angka Pertumbuhan (%)
1	2007	6,35
2	2008	6,01
3	2009	4,63
4	2010	6,22
5	2011	6,49
6	2012	6,26
7	2013	5,73
8	2014	5,73
9	2015	4,79
10	2016	5,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas penulis menemukan bahwa angka pertumbuhan ekonomi indonesia mengalami fluktuasi pertahunnya dari periode 2007 sampai dengan periode 2016. Sejak tahun 2007-2016 pertumbuhan ekonomi tidak pernah diatas 5 persen. Tabel diatas mendeskripsikan bahwa indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya belum stabil dan masih berkisaran 4% pertahunnya

Pada krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia fluktuatif tiap tahunnya. Pada masa pemerintahan sebelumnya pertumbuhan ekonomi indonesia cenderung naik,

tetapi pada masa pemerintahan saat ini mulai menurun walaupun kedepannya ada potensi untuk semakin lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kesejahteraan, artinya semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi (Saputra, 2011).

Kemiskinan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya penduduk yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan pada umumnya tidak memadai (Saputra, 2011: 1). Negara indonesia sering dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tersebut keempat di dunia setelah tiongkok, India dan Amerika Serikat (sumber: Wikipedia.org).

Jumlah tingkat pengangguran indonesia dapat dilihat melalui tabel yang dibuat penulis berdasarkan data yang ditemukan sebagai berikut

Tabel 1.3 Tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2007-2016

No	Tahun	Jumlah jiwa (juta orang)	Pengangguran dalam persen (%)
1	2007	10,010.000	9,11
2	2008	9,430.000	8,39
3	2009	9,260.000	7,87
4	2010	8,320.000	7,14
5	2011	7,700.000	6,56
6	2012	7,240.000	6,14
7	2013	7,170.000	6,17
8	2014	7,240.000	5,94
9	2015	7,560.000	6,2
10	2016	7,020.000	5,5

Sumber : Badan Pusat Statistik indonesia, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di indonesia mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan karena pasalnya penulis melihat bahwa sejak periode 2007-2016, penurunan jumlah total pengangguran indonesia tidak pernah melebihi dari angka 1% .

Di Negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang dalam peraturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi peleraai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicega. Tidak ada satupun perekonomian, termasuk negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah perbedaan kadarnya, di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas (Dumairy,1996: 157).

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah atau disebut belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang (Suparmoko, 2003).

Tabel 1.4 Jumlah belanja Pemerintah Indonesia tahun 2007-2016

No	Tahun	Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Pemerintah
1	2007	14.732.776.642	133.045.900.061	504.776.000.000
2	2008	18.943.346.819	143.692.431.250	573.431.000.000
3	2009	23.412.329.896	146.926.567.973	716.376.000.000
4	2010	26.992.274.147	142.008.916.727	725.243.000.000
5	2011	33.656.718.936	174.472.951.236	836.578.000.000
6	2012	41.370.226.739	203.351.689.273	964.997.000.000
7	2013	49.557.469.337	252.386.008.253	1.154.381.000.000
8	2014	51.521.457.321	295.157.998.331	1.249.943.000.000
9	2015	52.297.824.333	312.165.667.123	1.392.442.000.000
10	2016	61.389.254.575	326.247.641.215	1.449.232.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah belanja pemerintah pertahun memiliki jumlah yang besar yang dianggarkan pada beberapa sektor dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan negara.

Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ketahun selalu meningkat. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat bersifat “*exhaustive*” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat “*transfer*” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (Suparmoko, 2003: 22).

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen untuk mengatasi kemiskinan yang ada di negara kita. Pemerintah sudah mengupayakan dan melakukan berbagai macam kebijakan atau program untuk pengetasan kemiskinan dengan berbagai pengeluaran. Pemerintah membuat beberapa program yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagian pendidikan, Raskin (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan masih banyak lagi program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini.

Berdasarkan dari hasil menguraikan beberapa variabel di atas berupa tingkat kemiskinan yang semakin berkurang, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil bahkan cenderung menurun, jumlah pengangguran yang berkurang serta belanja negara yang semakin besar, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007-2016”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2016?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2016?
3. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2016.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2016
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2016.

D. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah terhadap khususnya instansi-instansi terkait.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui kondisi perekonomian yang sedang berjalan.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan ekonomi ,pengangguran, belanja pemerintah dan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang sering kali dijumpai dalam bermasyarakat. Kemiskinan juga sering dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan (Andre Bayo, 2007).

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi sehingga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan

gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyat, 2004: 237).

Negara miskin menghadapi masalah klasik. Pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Isu mendasarnya adalah tidak hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan PDB atau PNB namun juga siapa yang membuat PDB atau pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh. Bila pertumbuhan terutama disumbangkan oleh segelintir orang (golongan kaya), maka merekalah yang paling mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang, maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan merata. Banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tetapi tidak membawa manfaat bagi penduduk miskinnya. Ini dialami oleh ratusan juta penduduk di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, dimana tingkat kehidupannya relatif berhenti dan bahkan anjlok bila dinilai riil. Dengan lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dua sisi, yaitu: pertama kemiskinan absolut, dimana pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2006: 111).

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, kaum wanita sering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih banyak dari

pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompok-kelompok minoritas tertentu. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (inequality). Kemiskinan berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan di miliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan sangat tinggi (Kuncoro 2006: 112).

1. Penduduk miskin

Indonesia merupakan Negara berpenduduk terbanyak ke-3 setelah China dan AS. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di Negara berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah dan tingkat pembentukan yang rendah semakin sulit bagi Negara yang berkembang untuk menopon ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini di tekan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata dalam perekonomian (Astuti, 2015).

Pada tahun 1798 Reverend Thomas Malthus mengemukakan teorinya tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dalam

tulisannya yang berjudul *Essay on the principle of population* ia melukiskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing returns*). Malthus menjelaskan kecenderungan umum di suatu Negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena itu pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan per kapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk yang tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten (Arsyad, 2014: 270).

Ahli-ahli ekonomi pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan penduduk dapat menjadi suatu faktor mendukung maupun penghambat dalam pembangunan ekonomi. Di pandang sebagai pendorong karena perkembangan penduduk memungkinkan pertambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Dorongan lainnya terhadap pembangunan ekonomi berupa perluasan pasar. Luas pasar barang-barang dan jasa-jasa ditentukan oleh dua faktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Maka apabila jumlah penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Pertambahan penduduk juga merupakan salah satu faktor penting yang menimbulkan perbaikan teknologi pertanian dan negara-negara maju sejak beberapa abad yang lalu Menurut (Sukirno, 1981: 202).

Akibat buruk yang mungkin di timbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktifitas sector produksi sangat rendah sekali dan masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan berlakunya dua keadaan ini maka pertambahan penduduk tidak akan menaikkan produksi dan yang lebih buruk lagi, masalah pengangguran akan menjadi bertambah serius. Di samping itu produktivitas rendah akan menyebabkan perkembangan produksi hasil pertanian yang sangat rendah. Hal ini mungkin menimbulkan penurunan dalam tingkat pendapatan perkapita (Sukirno,1981: 203).

Di Negara-Negara berkembang penduduk lebih merupakan penghambat kepada pembangunan. Ciri-ciri Negara sedang berkembang yaitu semakin rupa keadaannya sehingga perkembangan penduduk menimbulkan lebih banyak akibat-akibat negatif-negatif terhadap pembangunan. Pengangguran yang jumlahnya sudah berlebihan, tingkat pendapatan per kapita rendah, jaringan pengakutan yang masih belum sempurna, terdapatnya tenaga kekurangan terdidik dan usahawan dan masih tetap terbatasnya dana untuk menanam modal merupakan berapa ciri penting Negara-negara berkembang yang menyebabkan pertambahan penduduk lebih merupakan penghambat kepada pembangunan ekonomi (Sukirno,2004: 203).

Beberapa ahli ekonomi telah membuat analisa mengenai pengaruh buruk yang mungkin di timbulkan oleh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai analisa tersebut dapat di bedakan dalam dua golongan. Analisa-analisa yang termaksud dalam golongan pertama merupakan yang secara langsung menunjukkan berkaitan di antara tingkat perkembangan penduduk dengan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan analisa-analisa yang termaksud dalam golongan kedua lebih menekankan kepada menelaah pengaruh perkembangan penduduk terhadap beberapa faktor yang akan menentukan lajunya pertumbuhan pendapatan nasional (Sukirno, 2004: 204).

Analisis mengenai pengaruh langsung dari pertumbuhan penduduk kepada perkembangan tingkat kesejahteraan dilakukan oleh Nelson dan Leibenstein. Mereka mengemukakan teorinya masing-masing dalam waktu yang hampir bersamaan dan pokok pandangan mereka juga tidak hanya berbeda. Nelson maupun Leibenstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara-negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang mungkin menurun. Mereka menunjukkan bahwa akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat dalam jangka panjang tingkat pendapatan per kapita akan kembali mencapai nilai yang sama dengan tingkat pendapatan yang cukup hidup (Sukirno, 1981: 204).

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan diperkecil pendapatan perkapita menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996: 68).

Pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Karena adanya proses pertumbuhan hasil yang semakin berkurang di suatu

faktor produksi yang jumlahnya tetap yaitu tanah. Maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung, karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat terpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai fungsi pangan perkapita) cenderung mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit diatas tingkat subsisten Malthus (Todaro, 2006: 232).

Seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pandangan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relative rendah dibandingkan rata-rata orang-orang lain dalam perekonomian tersebut. secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut dibawah subsisten, ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar atas aspek kehidupan, kemiskinan lebih berkait ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak (Siregar dan Wahyuniarti, 2008: 27).

2. Penyebab kemiskinan

Menyatakan bahwa kemiskinan di Negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara berlainan, 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam manusinya, 4) perbedaan peranan faktor swasta dan Negara, 5) perbedaan struktur industri, 6) perbedaan derajat

ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan kelembangan dalam negeri (Todaro, 1995: 37).

Penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara Mikro, kemiskina muncul karena adanya sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang jumlah terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung adanya deskriminasi atau karena keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya pendapatan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berfikir ini di kemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembanguna ternama, di tahun 1953, yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*”, (negara miskin itu miskin karena dia miskin), (Kuncoro, 2006: 120).

3. Ukuran Kemiskinan

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu , pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang di

dasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang di dasarkan pada konsumsi, (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen. yaitu, 1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya, 2) jumlah kebutuhan lainnya yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama sangat relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lainnya dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin, sedangkan yang kedua sifatnya lebih subyektif (kuncoro, 2006: 113).

Badan pusat statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan di pandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis miskin.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian,

umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, minyak dan lemak, dan lain- lain).

Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan bukan makanan BPS (badan pusat statistik) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kalori perkapita per hari yang akan di setarakan dengan rupiah. Selanjutnya, 2.100 kilokalori perkapita per hari akan di setarakan dengan rupiah ketika pengukuran kemiskinan dilakukan di tiap daerah/provinsi tertentu. Sehingga pengukuran menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu.

4. Persentase penduduk miskin

Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) dengan Keterangan : $z = 0$, z = garis kemiskinan, y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$, q = banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, n = jumlah penduduk.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Adanya dua macam kemiskinan yang umumnya di gunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 2004 :238).

a. Kemiskinan absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk memungkinkan seseorang untuk dapat hidup layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan menbandingkan tingkat pendapatan orang dan tingkat pendapatan yang di butuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatasan antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering di sebut sebagai garis batas kemiskinan, konsep ini di sebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini di maksudkan tingkat pendapatan minimum yang cukup memenuhi kebutuhan fisik terhadap, makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 2004: 238).

Kesulitan utama dalam konsep utama adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal yang tersebut tidak hanya di pengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan beberapa faktor lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fiscal sosialnya (Arsyad, 2004: 239).

Kebutuhan dasar dapat di bagi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang di perluhkan sekali untuk mempertahankan lain yang lebih tinggi. United nation research institute fo social devolodment (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas dasar tiga kelompok yaitu :pertama, kebutuhan fisik yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan. Kedua, kebutuan kultural yang terdiri dari

pendidikan, waktu luang, rekreasi serta ketenangan hidup. Dan ketiga, kelelahan pendapatan untuk mencapai kebutuhan yang lain yang lebih tinggi. Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan hidup manusia, seperti yang dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO, 1976): kebutuhan dasar meliputi dua unsur, pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu tempat tinggal, pakaian, juga peralatan, dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan, kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan dan kultural (Arsyad, 2004: 239).

b. Kemiskinan Relatif

Tidak selalu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka seseorang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan (Arsyad, 2004: 239).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan di kategorikan sebagai penduduk miskin.

Ada beberapa tolak ukur yang dikembangkan untuk mengukur kemiskinan masyarakat yaitu, 1) setara dengan beras, 2) kebutuhan fisik minimum (KFM), 3) ukuran kemiskinan relatif, 4) badan pusat statistik tolak ukur dari bank dunia. Setara dengan beras yaitu batasan atau ukuran kemiskinan yang diajukan oleh prov Sajogyo (1997) dan sesuai dengan perkembangan zaman oleh Sucipto warasarijana (1991) menggunakan tingkat konsumsi atau pengeluaran serta jumlah kg beras perorang atau pertahun. Standar internasional yang biasa di pakai Bank dunia adalah pendapatan kurang dari dunia kurang dari dua dollar AS per hari, tetapi ada juga yang memakai satu dollar per hari. Garis kemiskinan Profesor sajogyo, dalam studi selama bertahun-tahun menggunakan suatu garis kemiskinan yang di dasarkan pada harga beras sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi perkapita setahun yang sama dengan beras (Kuncoro, 2006: 118).

Kebutuhan fisik minimum (KFM), adalah kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, rumah dan sebagainya) selama satu bulan bagi seorang pekerja, yang diukur dalam uang berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang di perlukan untuk hidup layak, yang dinyatakan dalam rupiah. Angka ini dari waktu ke waktu dan dari daerah ke daerah perlu disesuaikan.

B. Perspektif Islam Tentang Kemiskinan

Cerita tentang masyarakat miskin selalu menciut dan mencuat di media massa yang ada di negara kita, layaknya pasang surut sebuah gelombang di lautan. Beritanya klise namun selalu aktual. Salah satunya di bulan ini berita tentang kemiskinan telah “dimenangkan” oleh seorang ibu dari Makassar. Ibu tersebut tengah hamil tujuh bulan yang mempunyai seorang anak, berusia lima tahun, tamat riwayatnya karena kelaparan. Tentu saja masalah yang paling mendasar adalah ekonomi.

Alquran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-'ailat (mengalami kekurangan), al-ba'sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu'tarr (yang perlu dibantu) dan al-dha'if (lemah). Kesepuluh kosakata di atas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin (QS An-Nisa/4: 135).

Kembali pada persoalan hukum alam di atas tentang keniscayaan adanya orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya (termasuk pemerintah) membantu orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya bantuan orang kaya tersebut, agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran (dan kemiskinan) akan menjadikan manusia pada kekufuran.

Alquran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-'ailat (mengalami kekurangan), al-ba'sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu'tarr (yang perlu dibantu) dan al-dha'if (lemah). Kesepuluh kosakata di atas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Sungguh, hal itu memang sejalan dengan sunatullah (baca: hukum alam) sendiri. Hukum kaya dan miskin sesungguhnya adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia, apa pun keyakinannya. Karena itu tak ubahnya seperti kondisi sakit, sehat, marah, sabar, pun sama dengan masalah spirit, semangat hidup, disiplin, etos kerja, rendah dan mentalitas (QS An-Nisa/4: 135).

Mulai dari program pemerintah dan masyarakat sendiri sama-sama berjuang memerangi kemiskinan. Tapi, harus disadari bahwa perjuangan melawan kemiskinan di negara kita, apa pun caranya, sesungguhnya sama dengan perjuangan seumur hidup. Masih panjang sekali perjalanan untuk mencapai hasilnya. Mengapa demikian? Karena kenyataan di lapangan berbeda dengan hasil data survey penelitian. Di atas kertas angka kemiskinan di negeri ini berhasil diturunkan, namun dalam perkembangan lebih lanjut juga memperlihatkan peningkatan.

Kembali pada persoalan hukum alam di atas tentang keniscayaan adanya orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya (termasuk pemerintah) membantu orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya bantuan orang

kaya tersebut, agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran (dan kemiskinan) akan menjadikan manusia pada kekufuran.

Islam sesungguhnya sudah sangat jelas memberikan solusi untuk menangani masalah kemiskinan. Tinggal saat ini bagaimana kita mau atau sudah melaksanakannya atau tidak. Jika memang sudah, apakah kita masih konsisten melaksanakannya? Dalam Hadis Qudsi dikatakan bahwa Allah sesungguhnya memberikan solusi bagi orang yang konsisten dalam melakukan sesuatu yang benar meskipun dilakukannya sedikit demi sedikit.

C. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau memungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyusaian-penyusaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntunan keadaan yang ada. Masing-masing ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu. Yaitu, 1) kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari pada yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan penyediaan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economy maturity) di suatu Negara yang bersangkutan, 2) perkembangan teknologi merupakan dasar prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang

diperlukan, tetap tidak cukup itu saja (jadi disamping kemajuan teknologi masih diperlukan faktor-faktor lain, 3) guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkadang didalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian kelembagaan, sikap, dan ideologi (Todaro 1999: 130).

Dalam analisis yang panjang lebar, mengemukakan enam karakteristik atau proses pertumbuhan ekonomi yang biasa ditemui hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut : 1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk, 2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, 3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, 4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, 5) adanya kecenderungan Negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomian untuk berusaha menambah bagian-bagian lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru, 6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia (Todaro, 1999: 131)

1. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur ekonomi antara lain yaitu (Nugraheni dan Kristanto 2014).

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau ditingkat regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun yang dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global fisiknya, dan bukan alat ukur ekonomi yang tepat,

karena belum dapat dicerminkan kesejahteraan penduduk sesungguhnya, pada hal sesungguhnya kesejahteraan yang harus dinikmati oleh setiap penduduk Negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto perkapita/ pendapatn perkapita

Produk Domestik Bruto perkapita atau Produk Regional Bruto (PDRB) per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk disuatu Negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja, produk domestik brutoper kapita baik tingkat nasional maupun PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di Negara manapun didaerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

D. Teori Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topic yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantuh menciptakan lapangan pekerja (Mankiw, 2006: 154).

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang sedang aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkau upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran adalah angkatan

kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan satu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerja tetapi belum memulai bekerja (BPS: 2010), Pengangguran terbuka adalah yang mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja (Sukirno, 2004: 28).

Untuk mengelompokkan dan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi: 1) waktu banyak di antara mereka yang bekerja ingin lebih lama, misalnya jam kerjanya perhari, perminggu atau pertahun, 2) Intesitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan), 3) produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumberdaya-sumberdaya komplementer untuk melakuka pekerjaan). (Arsyad, 2004:288).

Berdasarkan hal-hal tersebut Ewards membedakan 5 bentuk pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka: Baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang bekerja tetapi tida memperoleh pekerjaan).
2. Setengah menganggur (*underemployment*) yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu musiman) kurang dari yang mereka bisa bekerja.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka atau setengah manganggur, termasuk disini adalah:

- a. Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penuh, padahal kerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
- b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
- c. Pension lebih awal, fenomena ini merupakan kekayaan yang terus berkembang dikalangan pegawai pemerintah. Di beberapa Negara, usia pension dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi yang muda-muda untuk menduduki jabatan di atasnya.
4. Tenaga kerja lemah (*impaired*) yaitu mereka yang mungkin bekerja *full time*, tetapi intesitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
5. Tenaga kerja yang tidak produktif yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai maka tidak bisa menghasilkan sesuatu.

sejarah mencatat bahwa pembangunan ekonomi di Negara-negara eropa barat dan Amerika Utara yang sering dideskripsikan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena dua faktor, yaitu: 1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru, 2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja di sektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah pedesaan (Kuncoro, 2009: 226)

Jumlah orang yang mencari pekerjaan di Negara-negara berkembang tergantung pada jumlah serta komposisi umur penduduknya. Berbagai proses yang berkaitan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan tenaga kerja, terdapat dua masalah yaitu: *pertama*, Mortalitas dan fertelitas, tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduknya, adanya perbedaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan rendah. Penurunan tingkat kematian akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sedangkan tingkat kelahiran yang tinggi mengakibatkan ketergantungan (*dependency ration*) yang tinggi serta tingginya kenaikan angkatan kerja dimasa mendatang. *kedua*, dampak penurunan fertilitas terhadap jumlah tenaga kerja dan struktur umur yang baru terasadalah waktu jangka panjang walaupun penurunan tersebut berlansung cepat (Todaro 1989: 233),

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga akan menyebabkan jumlah lapangan kerja menjadi sempit atau sedikit. Hal ini dapat menyebabkan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi disuatu daerah menunjukkan kurang berhasilnya pembangunan dan menyebabkan kemiskinan (Wiguna, 2013: 4).

E. Belanja Pemerintah

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah ikut berbisnis meskipun hal ini sangat sering dilakukan, terutama oleh pemerintah dinegara-negara

sedang berkembang, melinkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya (Dumairy, 1996: 157).

Di Negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintah yang dalam peraturan ekonomi negaranya berperan semata-mata hanya sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi pelera jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan. keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk di cegah. Tidak ada satupun perekonomian, termasuk Negara kapitalis atau Negara maju, bebas dan investasi pemerintahnya. Yang ada ialah perbedaan kadarnya, di beberapa dinegara pemerintah terlibat erat dalam perekonomian, sementara di Negara-negara lainnya campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relative lebih terbatas (Dumairy, 1996: 157).

Dalam kenchah perekonomian moderen, peranan pemerinah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu : 1) peran alokatif, yakni peranan pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatan bisa optimal dan mendukung efesiensi produksi, 2) peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar, 3) peran stabilisatif, yakni perana pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika

berada dalam keadaan disequilibrium, 4) peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar cepat tumbuh, berkembang dan maju (Dumairy, 1996: 158).

Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah meningkat hampir semua didalam semua macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam rill dapat dipakai sebagai indicator sebagai besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu perekonomian (Suparmoko, 2003: 22).

Pemerintah pusat membeli senjata, perahu kendali, dan jasa pegawai pemerintah. Pemerintah lokal membeli buku-buku untuk perpustakaan, membangun gedung-gedung dan memperkerjakan para guru. Pemerintah disemua tingkat membuat jalan dan pekerjaan publik lainnya. kesejahteraan publik sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat, Negara, melalui belanja Negara atau belanja pemerintah, dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Belanja Negara dituangkan dalam APBN (Anggaran pendapatan dan Belanja Negara). (Mankiw, 2006: 61).

APBN merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara Negara untuk kurun waktu satu tahun. APBN dituangkan kedalam suatu format yang memuat format pengelompokkan jenis transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan Negara menurut pengaruh terhadap psosisi keuangan Negara dalam kurun waktu satu tahun. APBN menjadi alat strategis pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi publik. Disatu sisi APBN berperan sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan Negara melalui pajak dan retribusi dari proses dan hasil aktivitas ekonomi di masyarakat, dan disisi lain APBN berperan sebagai alat untuk belanja Negara, yaitu alokasi pembelanjaan uang ketengah masyarakat yang berasal dari pendapatan Negara. Melalui kedua peran ini, kecepatan dan ketetapan aktivitas ekonomi di masyarakat dapat didorong sehingga bisa diarahkan untuk bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Noor, 2006: 252).

Belanja pemerintah adalah pengeluaran pemerintah diperuntukkan bagi pendanaan urusan pemerintah, baik urusan wajib, pilihan, dan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Pengeluaran belanja ini dapat mendukung berbagai program dan kebijakan-kebijakan dalam stabilitas perekonomian nasional (Siregar dan Faizah ; 2012).

1. Komponen Belanja Pemerintah

Dalam neraca anggaran pendapatan dan Belanja Negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk menbiayai pelaksana roda pemerintah sehari-hari, meliputi belanja

pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga pemerintah, serta jumlah pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran mpembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Agak sulit untuk membedakan dengan tegas apakah suatu pengeluaran termasuk kedalam pengeluaran rutin atukah pengeuaran pembangunan, karena batas perbedaan antara keduanya relative kabur. Sebagai contoh : berbagai macam upah dan gaji tambahan, yang menurut logika awal termasuk pengeluran rutin, oleh pemerintah digolongkan sebagai pengeluaran pembangunan (Dumairy, 1996: 165).

Ada beberapa komponen belanja pemerintah (Siregar dan Faizah: 2012). Yaitu:

- a. Belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai yang mengadung pengertian belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk upah lembur dan pengeluaran lain pegawai. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan berbagai program. Belanja barang dan jasa jga merupakan belanja langsung ini di gunakan untuk pembelian atau pengadaan barang nilai bermanfaatnya kurang dari setahu atau untuk pengeluaran pemakaian jasa untuk melaksanakan berbagai program. Belanja lain yang termasuk belanja langsung yaitu barang modal yang merupakan belanja untuk meningkatkan modal yang dapat menambah asset tetap bagi suatu Negara dengan melakukan pemilihan untuk mempertahankan invertaris atau infrastruktur

yang dimiliki suatu Negara sehingga memberikan manfaat seta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas asset Negara.

- b. Belanja tidak langsung, meliputi : 1) belanja pegawai, yaitu belanja dalam bentuk kompesasi yang diberikan kepada pegawai berupa gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai undang-undang, 2) belanja bunga yang merupakan belanja yang digunakan untuk pembayaran bunga utang berdasarkan kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, menengah dan panjang, 3) belanja subsidi, belanja yang dianggarkan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar hasil produksi yang dilakukan perusahaan termasuk dapat dijangkau oleh masyarakat banyak, 4) belanja hibah, belanja yang diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa, 5) belanja bantuan sosial, belanja yang dianggarkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, perlindungan sosial dan pengatasan kemiskinan, 6) belanja bagi hasil dan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan, 7) bantuan keuangan, belanja yang diberikan kepada daerah untuk pemerataan dan bantuan keuangan akibat krungnya keuangan daerah, 8) belanja tidak terduga, belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga.

F. Hubungan variabel

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB/PDRB tentang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata

diukur berdasarkan PDB/PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar pelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa berupah pola makanan pokoknya kebarang yang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang (Sukirno, 2000: 14).

Kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak dikawasan tersebut. Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang disuatu kawasan (Negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibalangkan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan miskin (Siregar dan Wahyuniarti, 2008: 25).

Perluhnya peninjauan kembali pada prioritas pembangunan diseluruh Negara berkembang, yakni dari yang semula berorientasikan kepada maksimalisasi laju pertumbuhan GDB/GNP ketujuan mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan langsung, seperti halnya pengatasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan pendapatan. Namun disadari peninjauan kembali tersebut untuk perbaikan nasib golongan miskin akan dihadapkan pada berbagai masalah dan

kendala politik, kelembagaan dan hal lainnya yang berkaitan dengan struktur kekuasaan (Todaro, 2000: 211).

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai macam pernyataan dan masalah kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting dalam program pembangunannya dirancang untuk mengetaskan kemiskinan. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ekonomi telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam penurunan tingkat kemiskinan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan-tujuan pembangunan. Kedua hal tersebut kadang tidak bisa secara tumbuh bersama-sama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik (Todaro, 2000: 211).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata bisa saja sekaligus diraih, dan beberapa Negara yang mampu membuktikan. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang harus berjalan secara bersama-sama. Pilihan yang diambil adalah bukan strategi pembangunan yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya didalam suatu Negara tertentu atau bukan juga strategi yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata, tetapi kedua hal tersebut penting untuk diraih secara bersama-sama (Todaro, 2000: 212).

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Dwi (2010), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini saat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
- b. Jika rumah tangga tingkat menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka panjang.

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja separuh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termaksud diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas. Namun demikian, salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang bekerja secara penuh adalah orang kaya (Arsyad, 2004: 289).

Hal ini kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang rela sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka memiliki sumber lain yang bisa menbatuh masalah keuangan mereka, misalnya (dari famili, teman, tempat

meminjam uang). Orang-orang seperti ini biasa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyak individu yang mungkin bekerja secara penuh perhari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri di sektor informal perkotaan (tukang bakso, penjual es teler, penjual rokok dipinggiran jalan dan sebagainya) yang demikian. Tetapi mereka tergolong masih tetap miskin. Sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, (Terutama kelompok berpendapatan sedikit berada diatas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin meningkatkan kemiskinan.

Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Sebagian besar didalamnya adalah mereka yang bekerja secara tetap di sektor pemerintah dan swasta termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja "*full time*" relative berpenghasilan baik. Terdapat kemungkinan adanya pengangguran yang menganggur secara sukarela serta kualifikasi kecakapan. Mereka menolak jenis pekerjaan yang tidak disukai dan hal ini mereka bisa menolak karena memiliki cukup

sumbu keuangan dari keluarga, teman atau pinjaman lainnya. Mereka yang seperti ini digolongkan sebagai penganggur tetapi tidak miskin. Demikian pula orang yang bekerja secara penuh, dilihat dari jumlah jam kerja tiap hari, tetapi memperoleh pendapatan yang sangat rendah. Banyak orang yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pekerjaan dibengkel, dan sebagainya. Mereka dikelompokkan sebagai pekerja secara penuh tetapi mereka pada umumnya mereka juga dikategorikan orang miskin. Harus diakui bahwa penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dan luas untuk memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu ketenagakerjaan harus dijadikan strategi utama dalam mengatasi kemiskinan (Todaro, 1989: 235).

3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari sisi ekonomi politik, pengeluaran atau belanja Negara dalam APBN ditunjukkan untuk manajemen pemenuhan kebutuhan publik. Pemerintah adalah pihak yang mewakili dan menjalankan tugas dan fungsi Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (Noor, 2015: 258).

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau Negara setidaknya ditentukan dua hal:

- a. Masyarakat mempunyai sumber nafkah atau sumber pendapatan yang memadai, yaitu dengan mempunyai pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya
- b. Terpenuhinya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari negaranya. Pelayanan ini merupakan tersedianya barang dan jasa kebutuhan publik (air, listrik,

kesehatan, pendidikan, keamanan) dan hak-hak publik lainnya untuk dapat hidup layak.

Untuk mewujudkan kedua hal diatas, diperlukan kemampuan Negara (pemerintah) untuk mengadakan berbagai sarana dan fasilitas publik dan jasa pelayanan kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Negara dan pemerintah seperti itu, diperlukan Negara yang memadai untuk menbiyai berbagai kebutuhan mencapai tujuan bernegara.

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung di konsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping ini pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat “transfer” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (grants). Jadi exhaustive expenditure” mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Sedangkan “transfer payments” hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain dan menbiarkan yang terakhir ini menentukan penggunaan dari uang tersebut. Exhaustive expenditure dapat merupakan pembelian barang-barang dihasilkan oleh swasta misalnya bahan makanan, bangunan, mesin dan sebagainya dan dapat pembelian itu dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai negeri dan sebagainya (Suparmoko, 2003: 22).

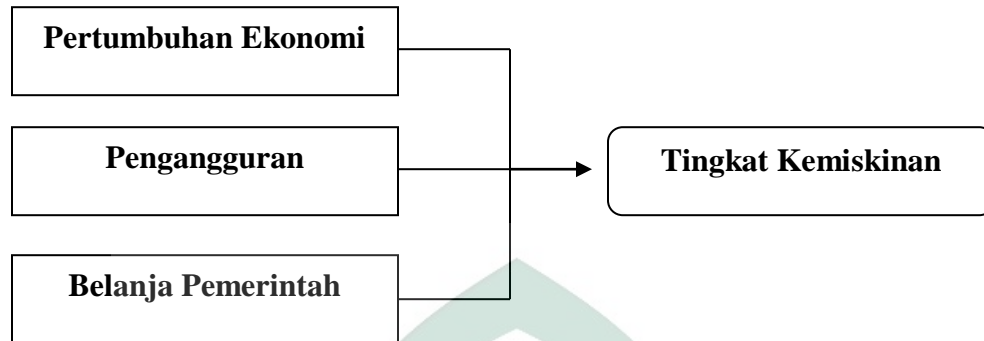
Belanja Negara, idelanya bukan besaran dan vulumenya saja yang penting, namun yang juga perlu diperhatikan adalah ketepatan penggunaannya. Apakah dapat merangsang aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan publik. Sebagai contoh, dalam menyusun rencana belanja, dampak yang dapat ditimbulkan oleh belanja ini dimasyarakat harus difikirkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja negara atau pemerintah berperan penting dalam pengatasan kemiskinan (Noor, 2015: 252).

G. Penelitian Terdahulu

1. Judul skripsi “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014” Jurusan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta oleh Seri Jefry Adil Waruwu. Jenis penelitian adalah *Expost Facto*. Pengumpulan data dengan tehnik dokumentasi yaitu dengan mencari data yang dengan tehnik dokumentasi yaitu dengan mencari data yang didapat dari badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesi (BI), BAPPENAS di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda.
2. Ilham Kurnian Hadi tahun 2014, Analisis Faktor-Faktor ysng mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provensi Sumatera Barat. Variabel yang di gunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga kerja ekspor. Hasil penilitian ini menunjukkan jumlah Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provensi Sumatera Barat.

H. Kerangka Fikir

Gambar 2.1 kerangka Pikir Penelitian



1. Pertumbuhan ekonomi indicator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan nasional dapat menyebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, tingkat pengangguran akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Belanja Pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Dengan program yang tepat sasaran atau mengalokasikan dana yang termasuk pengeluaran pemerintah maka kemiskinan semakin berkurang di Indonesia.

I. Hipotesis

1. Di duga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Di duga bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Di duga bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *kuantitatif*, yaitu metode penelitian yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Indonesia secara keseluruhan yang diambil berdasarkan dokumentasi kepustakaan, melalui Badan Pusat Statistik Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif yaitu berupa data yang terbentuk angka-angka. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dicatat dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada waktu 2007-2016. Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan analisis adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan kemiskinan di Indonesia periode 2007-2016

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan,

literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

D. Metode Analisis Data

Dalam analisis ini, digunakan metode teknik analisis komparatif dan kuantitatif, yaitu dugaan membandingkan permasalahan dan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan variabel. Data dalam penelitian berbentuk angka-angka atau serta menganalisis masalah yang sedang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Untuk menguji bisa digunakan dan untuk menguji hipotesis yang dilakukan maka diperlukan pengujian statistik yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana :

Y = Variabel tingkat kemiskinan

a = Konstanta

X₁ = Variabel pertumbuhan ekonomi

X₂ = Variabel pengangguran

X₃ = Variabel belanja pemerintah

b₁ – b₂ – b₃ = Koefisien regresi masing-masing variabel independent

e = *Error term*

Untuk memudahkan regresi dapat dilakukan transformasi menjadi linear dalam bentuk logaritma natural (Ln) seperti pada persamaan estimasi regresi linear berikut:

$$\ln Y = \alpha + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + e\mu$$

Keterangan:

$\ln Y$ = Tingkat kemiskinan

$\ln X_1$ = Pertumbuhan ekonomi

$\ln X_2$ = Pengangguran

$\ln X_3$ = Belanja pemerintah

α = Konstanta

$b_1 - b_2 - b_3$ = Parameter yang di Estimasi

e dan μ = Bilangan natural dan kesalahan random

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan

metodek analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Uji normalitas dengan grafik normal P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikuti sertakan dalam pembentukan model regresi linear (Gujarati 1991 : 33). Untuk mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan SPSS dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas (*Correlation Matrix*).

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi kolrelasi antara yang tinggi diantara variable bebas. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini menggunakan *Durbin Watson* (DW). Jika nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari jumlah variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

d. Uji Heteroksedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroksedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroksedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik, yaitu melihat grafik *scartter plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ($y \text{ prediksi} - y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Deteksi ada tidaknya heteroksedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis komparatif untuk hubungan atau sumbangan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

a. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen dengan melihat pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, di mana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%.

b. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel

dependen secara nyata. Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, di mana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

c. Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel mampu menjelaskan variabel dependen.

d. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan dua variabel Independen (X). Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan (Y) : Jumlah Persentase kemiskinan di Indonesia Tahun 2007-2016 (Di dalam satuan persen).
2. Pertumbuhan Ekonomi (X1): Pertumbuhan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.
3. Pengangguran (X2) : jumlah orang yang termasuk dalam angkatan kerja, tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.
4. Belanja Pemerintah (X3): pengeluaran pemerintah menurut dari angka APBN, dinyatakan dalam miliar rupiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Peneliti

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, di sepanjang jalur pelayaran utama dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6° Lintang Utara- 11° Lintang Selatan dan dari 95° Bujur Timur-141° Bujur Timur. Indonesia juga berada pada zona cincin api yaitu daerah patahan yang rawan gempa. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.

Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Indonesia bagian barat merupakan bagian dari Benua Asia, Indonesia bagian timur merupakan bagian dari Benua Australia, sedangkan Indonesia bagian tengah merupakan peralihan yang disebut daerah *Wallace*. Dilihat dari segi jalur pegunungan yang ada, kepulauan Indonesia terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda. Pegunungan di Indonesia bagian

barat merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania, sedangkan pegunungan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Kondisi geologis tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan sering mengalami gempa bumi tektonik dan vulkanik.

1. Kondisi Demografi

Sejak kemerdekaan, penduduk Indonesia telah bertambah lebih dari tiga kali lipat menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2014 yang menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan menunjukkan tren yang menurun. Pada periode 2007-2017 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,38 persen. Sejak tahun 2003 tingkat fertilitas (TFR) cenderung stagnan. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menurunkan TFR dengan target 2,1 pada tahun 2014. Tingkat mortalitas pada bayi dan balita menunjukkan tren yang menurun sebagai cerminan dari tingkat kesehatan masyarakat yang makin baik. Tingkat kepadatan penduduk bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pulau Jawa masih menjadi pulau terpadat dihuni oleh 57 persen penduduk Indonesia. Sebagai dampak pembangunan, jumlah penduduk perkotaan terus bertambah. Pada tahun 2011 jumlah penduduk perkotaan sudah sama dengan penduduk perdesaan dan terus meningkat hingga 53,3 persen pada tahun 2014.

B. Deskripsi perkembangan variabel penelitian

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan dalam penelitian ini dari presentasi penduduk miskin di Indonesia tahun 2007-2016, secara umum presentasi tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, serta barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi. Dengan keadaan tersebut, banyak penduduk yang tergolong tidak miskin tapi penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2016

No	Tahun	Jumlah jiwa (juta)	Kemiskinan (%)
1	2007	37,170.000	16,58
2	2008	34,960.000	15,42
3	2009	32,530.000	14,15
4	2010	31,020.000	13,30
5	2011	29,890.000	12,50
6	2012	28,590.000	12,00
7	2013	28,550.000	11,40
8	2014	27,730.000	11,20
9	2015	28,590.000	11,22
10	2016	28.010.000	10,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan penurunan jika merujuk pada jumlah kemiskinan yang dihitung dari jumlah jiwa dan persen pada tahun 2007-2016 meskipun tidak secara signifikan. Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa sebuah keberhasilan. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau

kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk di kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan.

2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di definisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biayanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. Produk domestik bruto (PDB) adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Tabel 4.2 Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007-2016

No	Tahun	Angka Pertumbuhan (%)
1	2007	6,35
2	2008	6,01
3	2009	4,63
4	2010	6,22
5	2011	6,49
6	2012	6,26
7	2013	5,73
8	2014	5,06
9	2015	4,79
10	2016	5,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas penulis menemukan bahwa angka pertumbuhan ekonomi indonesia mengalami fluktuasi pertahunnya dari periode 2007 sampai dengan periode 2016. Sejak tahun 2007-2016 pertumbuhan ekonomi tidak pernah diatas 5 persen. Tabel diatas mendeskripsikan bahwa indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya belum stabil dan masih berkisaran 4% pertahunnya

3. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Indonesia

Pengangguran adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha. Masalah utama yang mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah pengangguran yang tertinggi. Indonesia dengan pertambahan jumlah penduduk yang banyak sehingga dapat menimbulkan tenaga kerja yang banyak pula. Hal ini di sebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru lebih besar di bandingkan dengan kesediaan lapangan pekerjaan.

Tabel 4.3 Tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2007-2016.

No	Tahun	Jumlah jiwa (juta orang)	Pengangguran dalam persen (%)
1	2007	10,010.000	9,11
2	2008	9,430.000	8,39
3	2009	9,260.000	7,87
4	2010	8,320.000	7,14
5	2011	7,700.000	6,56
6	2012	7,240.000	6,14
7	2013	7,170.000	6,17
8	2014	7,240.000	5,94
9	2015	7,560.000	6,2
10	2016	7,020.000	5,5

Sumber : Badan Pusat Statistik indonesia, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di indonesia mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan karena pasalnya penulis melihat bahwa sejak periode 2006-2017, penurunan jumlah total pengangguran indonesia tidak pernah melebihi dari angka 1% .

4. Perkembangan Belanja Pemerintah di Indonesia

Belanja pemerintah di tunjukkan untuk manajemen kebutuhan publik. Pemerintah adalah pihak yang mewakili dan menjalankan tugas dan fungsi negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah idealnya bkan besaran atau volumenya saja yang penting ketetapan penggunaannya. (Noor ,2015).

Pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya yaitu mengalokasikan, distributor dan stabilitator untuk menciptakan kesajahteraan bagi masyarakat. Olek karena itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus di rencanakan dan di gunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Tabel 4.4 Jumlah belanja Pemerintah Indonesia tahun 2007-2016.

No	Tahun	Barang dan Jasa (RP)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Pemerintah
1	2007	14.732.776.642	133.045.900.061	504.776.000.000
2	2008	18.943.346.819	143.692.431.250	573.431.000.000
3	2009	23.412.329.896	146.926.567.973	716.376.000.000
4	2010	26.992.274.147	142.008.916.727	725.243.000.000
5	2011	33.656.718.936	174.472.951.236	836.578.000.000
6	2012	41.370.226.739	203.351.689.273	964.997.000.000
7	2013	49.557.469.337	252.386.008.253	1.154.381.000.000
8	2014	51.521.457.321	295.157.998.331	1.249.943.000.000
9	2015	52.297.824.333	312.165.667.123	1.392.442.000.000
10	2016	61.389.254.575	326.247.641.215	1.449.232.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik indonesia, Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah belanja pemerintah pertahun memiliki jumlah yang besar yang dianggarkan pada beberapa sektor dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan negara.

Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ketahun selalu meningkat . Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat bersifat “*exhaustive*” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat “*transfer*” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (Suparmoko 2003:22).

Ada beberapa komponen belanja pemerintah (Siregar dan Faizah: 2012). Yaitu:

- a. Belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi: belanja pegawai yang mengandung pengertian belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk upah lembur dan pengeluaran lain pegawai. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan berbagai program. Belanja barang dan jasa jga merupakan belanja langsung ini di gunakan untuk pembelian atau pengadaan barang nilai bermanfaatnya kurang dari setahu atau untuk pengeluaran pemakaian jasa untuk melaksanakan berbagai program. Belanja lain yang termasuk belanja langsung yaitu barang modal yang merupakan belanja untuk meningkatkan modal yang dapat menambah asset tetap bagi suatu Negara

dengan melakukan pemilihan untuk mempertahankan inventaris atau infrastruktur yang dimiliki suatu Negara sehingga memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas asset Negara.

- b. Belanja tidak langsung, meliputi :
- 1) belanja pegawai, yaitu belanja dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai berupa gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai undang-undang,
 - 2) belanja bunga yang merupakan belanja yang digunakan untuk pembayaran bunga utang berdasarkan kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, menengah dan panjang,
 - 3) belanja subsidi, belanja yang dianggarkan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar hasil produksi yang dilakukan perusahaan termasuk dapat dijangkau oleh masyarakat banyak,
 - 4) belanja hibah, belanja yang diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa,
 - 5) belanja bantuan sosial, belanja yang dianggarkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, perlindungan sosial dan pengatasan kemiskinan,
 - 6) belanja bagi hasil dan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan,
 - 7) bantuan keuangan, belanja yang diberikan kepada daerah untuk pemerataan dan bantuan keuangan akibat krungnya keuangan daerah,
 - 8) belanja tidak terduga, belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga.

C. Hasil Pengolahan Data

1. Uji Asumsi Klasik

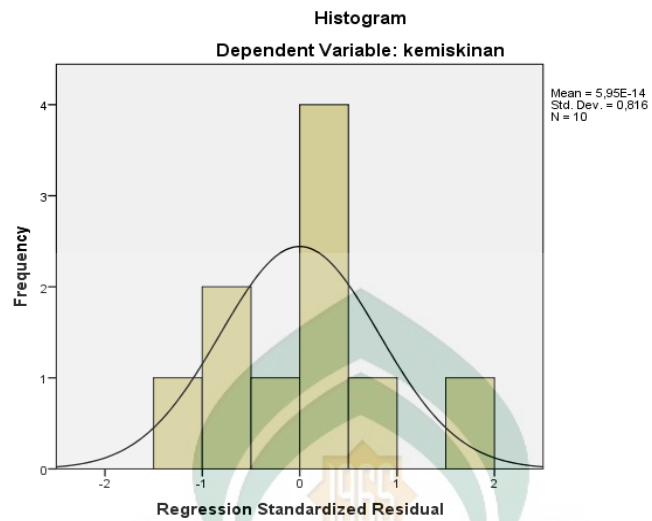
Analisis uji persyaratan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis korelasi. Adapun pengujianannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian berikut ini:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafis secara histogram ataupun dengan melihat secara *Normal probability plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas yang pertama dengan melihat grafik secara histogram dan grafik normal P-Plot sebagaimana terlihat dalam gambar 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.1

Grafik Histogram

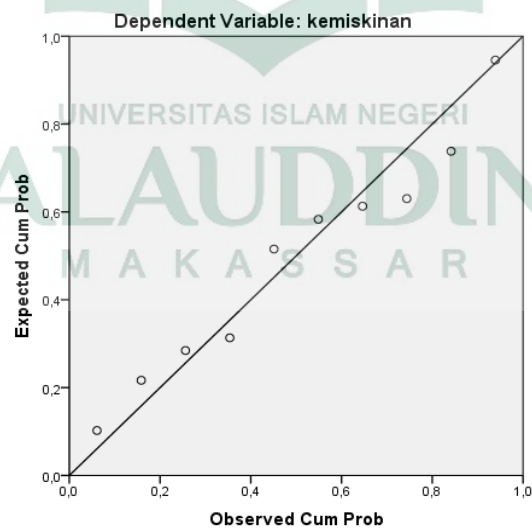


Sumber : Data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

Gambar 4.2

Grafik Nomal P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data di olah menggunakan program SPSS 20, 2017

Dari gambar 4.2 terlihat dari pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Dari gambar 4.2 sebagaimana terlihat dalam grafik *Normal probabilityplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti arah diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan modal regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat kemiskinan berdasarkan variabel.

b. Uji Multikolinieritas Data

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara yang tertinggi diantara variabel bebas. Toleransi mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi samadengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum di pakai adalah 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

Berdasarkan aturan variance inflation (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka di nyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaiknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pertumbuhan ekonomi	.474	2.110
Penagngguran	.200	4.991
Belanja pemerintah	.147	6.819

Sumber : Data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variable penelitian sebagai berikut:

- Nilai VIF untuk variabel model sebesar $2,110 < 10$ dan nilai toleransi sebesar $0,474 > 0.10$ sehingga variabel pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
- Nilai VIF untuk variabel model sebesar $4,991 < 10$ dan nilai toleransi sebesar $0,200 > 0.10$ sehingga variabel pengangguran dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
- Nilai VIF untuk variabel model sebesar $6,819 < 10$ dan nilai toleransi sebesar $0,147 > 0.10$ sehingga variabel pengangguran dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Jika nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari jumlah variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai Durbin Waston menunjukkan nilai sebesar 1,955 dengan ini nilai DW lebih besar daripada nilai DU maka dapat disimpulkan bahwa koefisien bebas dari gangguan autokorelasi. Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 ^a	.981	.972	.01681	1.955

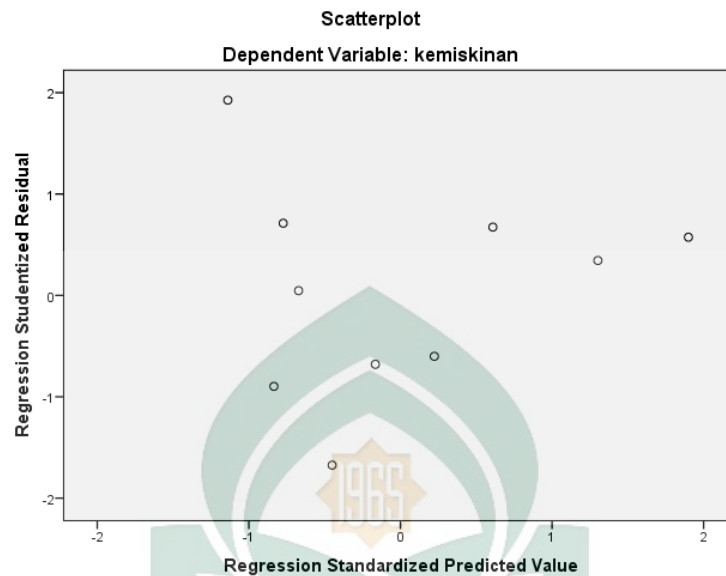
Sumber : Data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

d. Uji Heteroksidastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil gambar uji heterokedastisitas.

Gambar 4.3

Uji heterokedastisitas



Sumber : Data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

Dari gambar 4.3 scatterplot tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji *coefisient* berdasarkan output SPSS versi 20 terhadap ketiga variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah terhadap tingkat Kemiskinan Indonesia ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.051	2.605		.404	.701
X1	.202	.063	.260	3.204	.019
X2	.880	.097	1.135	9.805	.000
X3	.071	.041	.254	1.736	.133

Sumber : data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat hasil koefisien regresi (β) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.051 + 0.202X_1 + 0.880X_2 + 0.071X_3 + \mu$$

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien $\beta_0 = 1.051$, jika variable pertumbuhan ekonomi (X1), pengangguran (X2), belanja pemerintah (X3), maka jumlah konstan atau X =
- Nilai koefisien $\beta_1 = 0.202$. Artinya jika variable pengangguran. Dan variable pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1% maka jumlah kemiskinan mengalami peningkatan 1.051. koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi karna semakin naik pengangguran maka kemiskinan semakin meningkat.
- Nilai koefisien $\beta_2 = 0.880$. Artinya jika variable belanja pemerintah. Dan variable pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1% maka belanja

pemerintah mengalami penurunan .041. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan karena semakin naik pengangguran maka kemiskinan semakin meningkat.

- d. Nilai koefisien $\beta_3 = 0.041$. Artinya jika variable pengangguran. Dan variable belanja pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengangguran mengalami peningkatan 0.041. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negative antara belanja pemerintah dan pengangguran.

3. Uji hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian uji hipotesis dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Uji koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi untuk dua variabel bebas ditentukan nilai *adjusted R Square* sebagai berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 ^a	.981	.972	.01681	1.955

Sumber : Data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi yang disimbolkan $R^2(R-Square)$ sebesar 0,981, dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi tingkat kemiskinan yang bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah sebesar 98,1 sedangkan sisanya sebesar 1,9 % dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar penelitian.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji secara simultan untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ULN tapi belanja pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap ULN. Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Simultan (uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,089	3	,030	104,504	,000 ^b
1 Residual	,002	6	,000		
Total	,090	9			

Sumber : Data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 atas hasil regresi pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (X_1), pengangguran (X_2), berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) tapi variabel belanja pemerintah (X_3) tidak signifikan terhadap kemiskinan di

indonesia. maka diperoleh nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (X_1), pengangguran (X_2), belanja pemerintah (X_3) terhadap kemiskinan (Y) dan menganggap variabel dependen yaitu konstan. Dari hasil analisis diperoleh hasil output pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.051	2.605		.404	.701
X1	.202	.063	.260	3.204	.019
X2	.880	.097	1.135	9.805	.000
X3	.071	.041	.254	1.736	.133

Sumber : Data diolah menggunakan program SPSS 20, 2017

Berdasarkan Tabel 4.10 atas pengaruh secara parsial variabel tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan dapat dilihat dari arah tanda dari tingkat signifikan. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat signifikan $< 0,005$, dan pengangguran memiliki tingkat signifikan $< 0,005$ sedangkan belanja pemerintah tidak signifikan $> 0,005$.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial antara independen dan variabel dependen dapat di analisis sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) menunjukkan bahwa $\text{sig} > \alpha$ ($0,019 < 0,05$), berarti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran (X_2) menunjukkan bahwa $\text{sig} > \alpha$ ($0,000 < 0,05$), berarti variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan, variabel belanja pemerintah (X_3) menunjukkan bahwa $\text{sig} > \alpha$ ($0,133 > 0,05$), berarti variabel belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan (0.019) dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang di mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai macam pertanyaan dan masalah kesejahteraan, namun hal tersebut tetap

merupakan unsure penting dalam program pembangunannya yang dirancang untuk mengetaskan kemiskinan. Berbagai penelitian yang dilakukan para ekonomi telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam penurunan tingkat kemiskinan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan-tujuan pembangunan (Todaro, 2000:211).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata biasa saja sekaligus diraih dan beberapa Negara yang mampu membuktikannya. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan harus berjalan secara sama-sama. Pilihan yang diambil adalah bukan strategi pembagunan yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya didalam suatu negar tertentu atau bukan juga strategi yang menitik beratkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata (Todaro 2000: 212).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat meningkat sehingga akan berdampak pada kemiskinan yang menurun.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan (0.000) dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang di mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di indonesia.

Penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dan luas untuk memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu ketenagakerjaan ini harus dijadikan strategi utama dalam mengatasi kemiskinan. Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Sebagian besar didalamnya adalah merakayang bekerja *part time*. Mereka yang bekerja secara tetap di sector pemerintah dan swasta termaksud dalam kelompok pendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bias diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja "*full time*" relative berpenghasilan baik (Todaro 2013: 235)

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa salah satu factor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia adalah pengangguran yang tinggi. Ketidak tersedianya lapangan pekerjaan yang luas menyebabkan pendapatan masyarakat pendapatan rendah sehingga akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.

3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tingkat belanja pemerintah berpengaruh tidak signifikan (0.133) dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang di mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di indonesia.

Pemerintah pusat membeli senjata, peliura kendali dan jasa pegawai pemerintah. Pemerintah local membeli buku-buku untuk perpustakaan, membangun

gedung-gedung dan menpekerjakan para guru. Pemerintah disemua tingkat membuat jalan dan pekerjaan public lainnya (Mankwiw, 2006:61).

kesejahteraan public sangat di pengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Negara, melalui belanja pemerintah Negara atau pemerintah dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Belanja Negara dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).belanja Negara idealnya buakn besaran atau volumenya saja yang penting, namun yang juga perluh diperhatikan adalah ketepatan penggunaannya. Apakah dapat merangsang aktivitas ekonomi di masyarakat sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan public (Noor,2015:251).

Berdasarkan hasil penilitiaan ini, sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh singnifikan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskian di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa variable pertumbuhan ekonomi (X_1) dan pengangguran (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Variabel pengangguran (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Variabel belanja pemerintah (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

B. Saran

Beritik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dari hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Dengan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat diterapkan secara nyata. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pendapatan perkapita masyarakat juga bertambah sehingga akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.
2. Dengan terdapatnya pengaruh signifikan antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu mengurangi pengangguran melalui kebijakan fiskal yaitu dengan mengembangkan atau meningkatkan belanja pemerintah yang menciptakan pekerjaan baru.
3. Dengan tepatnya tidak berpengaruh signifikan antara belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah harus memperhatikan alokasi dari belanja pemerintah agar bias digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan public dan bias membantu perekonomian masyarakat, sehingga bias mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN,
- Astuti. 2015. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2004-2012*. Skripsi.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Laporan Perekonomian*.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Dwi Ravi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jateng Tahun 2005-2008*. Semarang: UNDIP Skripsi.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta : Kanisius.
- Gujati. 1999. *Ekonomi Dasar Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Kucoro, Muddrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: STIM YKPM.
- Mankiw, G. 2006. *Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Nor, H.F. 2015. *Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : PT. indeks.
- Sapurta, W.A. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Jawa Tengah*. Skripsi.

Siregar H, Wahyuniarti D. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*,”Jurnal Ilmiah.

Sukirno, Sadono. 1981. *Ekonomi Pembangunan : Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

.....2000. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

.....2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sumarpoko. 2003. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.

Todaro, Michael P. 1989. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.

.....2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Wiguna, V.I. 2013. *Analisis Pengaruh PDRD, Pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*” Artikel Jurnal.

LAMPIRAN



Lampiran 1

1. Data Kemiskinan di Indonesia

No	Tahun	Jumlah jiwa (juta)	Kemiskinan (%)
1	2007	37,170.000	16,58
2	2008	34,960.000	15,42
3	2009	32,530.000	14,15
4	2010	31,020.000	13,30
5	2011	29,890.000	12,50
6	2012	28,590.000	12,00
7	2013	28,550.000	11,40
8	2014	27,730.000	11,20
9	2015	28,590.000	11,22
10	2016	28.010.000	10,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017

2. Data Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

No	Tahun	Angka Pertumbuhan (%)
1	2007	6,35
2	2008	6,01
3	2009	4,63
4	2010	6,22
5	2011	6,49
6	2012	6,26
7	2013	5,73
8	2014	5,06
9	2015	4,79
10	2016	5,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2017

3. Data Pengangguran di Indonesia

No	Tahun	Jumlah jiwa (juta orang)	Pengangguran dalam persen (%)
1	2007	10,010.000	9,11
2	2008	9,430.000	8,39
3	2009	9,260.000	7,87
4	2010	8,320.000	7,14
5	2011	7,700.000	6,56
6	2012	7,240.000	6,14
7	2013	7,170.000	6,17
8	2014	7,240.000	5,94
9	2015	7,560.000	6,2
10	2016	7,020.000	5,5

Sumber : Badan Pusat Statistik indonesia, Tahun 2017

4. Data Belanja Pemerintah di Indonesia

No	Tahun	Total Belanja Pemerintah	Belanja Modal (Rp)
1	2007	504.776.000.000	133.045.900.061
2	2008	573.431.000.000	143.692.431.250
3	2009	716.376.000.000	146.926.567.973
4	2010	725.243.000.000	142.008.916.727
5	2011	836.578.000.000	174.472.951.236
6	2012	964.997.000.000	203.351.689.273
7	2013	1.154.381.000.000	252.386.008.253
8	2014	1.249.943.000.000	295.157.998.331
9	2015	1.392.442.000.000	312.165.667.123
10	2016	1.449.232.000.00	326.247.641.215

Sumber : Badan Pusat Statistik indonesia, Tahun 2017

**DATA HASIL LOGARITMA NATURAL KEMISKINAN,PERTUMBUHAN
EKONOMI,PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH**

1. Data Logaritma Natural kemiskinan

Tahun	Kemiskinan
2007	17.43
2008	17,37
2009	17,30
2010	17,25
2011	17,21
2012	17,17
2013	17,17
2014	17,14
2015	17,17
2016	17,15

2. Data Logaritma Natural Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Pertumbuhan ekonomi
2007	1,85
2008	1,79
2009	1,53
2010	1,83
2011	1,87
2012	1,83
2013	1,75
2014	1,62
2015	1,57
2016	1,61

3. Data Logaritma Natural Pengangguran

Tahun	Pengangguran
2007	16,12
2008	16,06
2009	16,04
2010	15,93
2011	15,86
2012	15,80
2013	15,79
2014	15,80
2015	15,85
2016	15,76

4. Data Logaritma Natural Belanja Pemerintah

Tahun	Belanja Pemerintah
2007	25,61
2008	25,69
2009	25,71
2010	25,68
2011	25,89
2012	26,04
2013	26,25
2014	26,41
2015	26,47
2016	26,51

Lampiran 2

HASIL REGRESI

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kemiskinan	17,2360	,10013	10
p.ekonomi	1,7250	,12903	10
Pengangguran	15,9010	,12922	10
b.pemerintah	26,0260	,35796	10

Correlations

		kemiskinan	p.ekonomi	pengangguran	b.pemerintah
Pearson Correlation	kemiskinan	1,000	,342	,973	-,839
	p.ekonomi	,342	1,000	,194	-,544
	pengangguran	,973	,194	1,000	-,838
	b.pemerintah	-,839	-,544	-,838	1,000
Sig. (1-tailed)	kemiskinan	.	,167	,000	,001
	p.ekonomi	,167	.	,296	,052
	pengangguran	,000	,296	.	,001
	b.pemerintah	,001	,052	,001	.
N	kemiskinan	10	10	10	10
	p.ekonomi	10	10	10	10
	pengangguran	10	10	10	10
	b.pemerintah	10	10	10	10

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	b.pemerintah, p.ekonomi, pengangguran _b	.	Enter
a. Dependent Variable: kemiskinan b. All requested variables entered.			

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,991 ^a	,981	,972	,01681	,981	104,504	3	6	,000	1,955

a. Predictors: (Constant), b.pemerintah, p.ekonomi, pengangguran

b. Dependent Variable: kemiskinan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,089	3	,030	104,504	,000 ^b
Residual	,002	6	,000		
Total	,090	9			

a. Dependent Variable: kemiskinan

b. Predictors: (Constant), b.pemerintah, p.ekonomi, pengangguran

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	1,051	2,605		,404	,701					
p.ekonomi	,202	,063	,260	3,204	,019	,342	,794	,179	,474	2,110
1 Pengangguran	,880	,097	1,135	9,085	,000	,973	,966	,508	,200	4,991
b.pemerintah	,071	,041	,254	1,736	,133	-,839	,578	,097	,147	6,819

a. Dependent Variable: kemiskinan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	p.ekonomi	pengangguran	b.pemerintah
1	1	3,996	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,004	31,562	,00	,44	,00	,00
	3	,000	158,069	,00	,13	,04	,08
	4	2,792E-006	1196,352	1,00	,43	,96	,92

a. Dependent Variable: kemiskinan

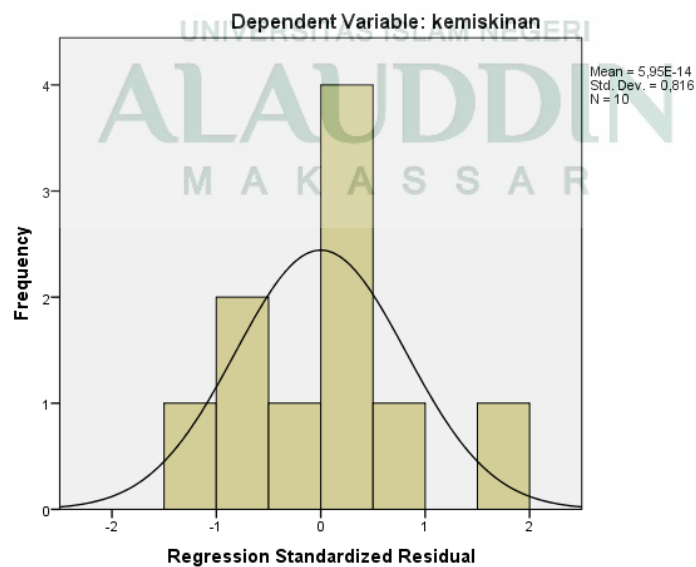
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	17,1231	17,4244	17,2360	,09919	10
Std. Predicted Value	-1,139	1,900	,000	1,000	10
Standard Error of Predicted Value	,007	,016	,010	,003	10
Adjusted Predicted Value	17,1111	17,4133	17,2327	,09575	10
Residual	-,02132	,02694	,00000	,01372	10
Std. Residual	-1,268	1,603	,000	,816	10
Stud. Residual	-1,675	1,926	,042	1,029	10
Deleted Residual	-,03716	,03889	,00326	,02415	10
Stud. Deleted Residual	-2,095	2,846	,088	1,299	10
Mahal. Distance	,889	7,224	2,700	1,965	10
Cook's Distance	,000	1,052	,235	,339	10
Centered Leverage Value	,099	,803	,300	,218	10

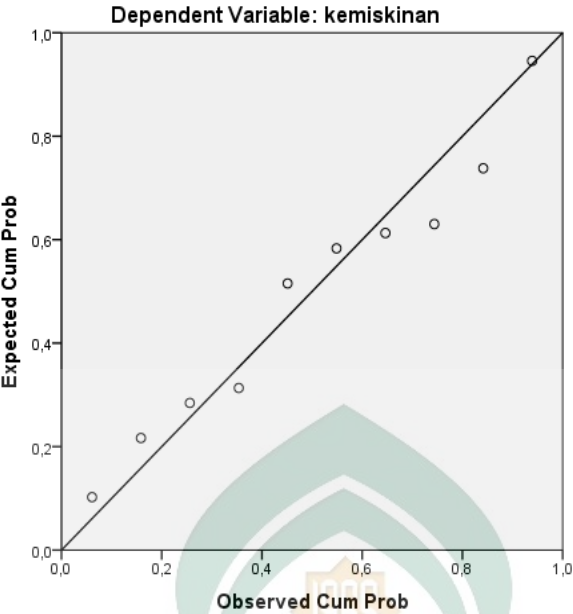
a. Dependent Variable: kemiskinan

Charts

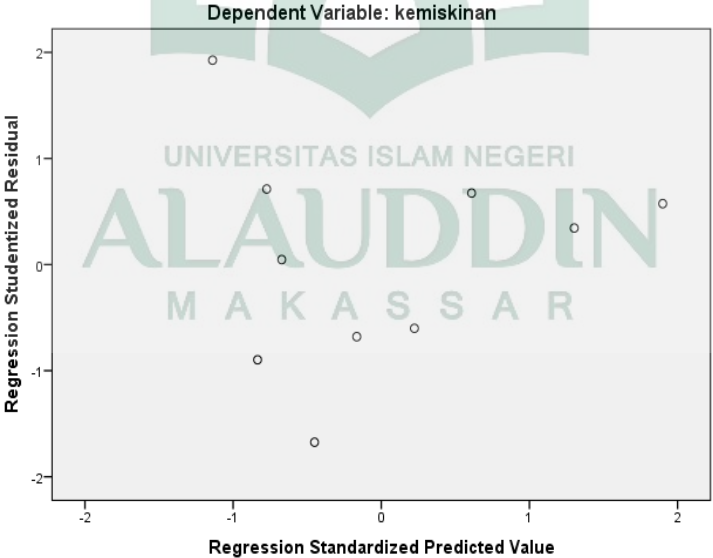
Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Asrianti**, lahir di Japing pada tanggal 17 Oktober 1994. Putri kedua dari pasangan Bapak Anwar dg Nyonri dengan Ibu Hamnun dg tongi. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2000 di SD Inpres japing, dan tamat pada tahun 2006, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Guppi samata dan tamat pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Madrasah Aliyah Guppi samata dan tamat pada tahun 2012.

Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN-TULIS) pada tahun 2013, penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.